

STRATEGI FINANSIAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENGELOLA PEMBIAYAAN SEKOLAH RINTISAN di SD MUHAMMADIYAH TUNAS SURYA

Muh Nur Azis Yusuf¹⁾, Ghuftron Ahmad Muzakki²⁾, Evlia Ratna Arjanti³⁾, Wegang Sri Sulanjari⁴⁾, Lukit Adi Syam Ari⁵⁾, Harsono⁶⁾, Indri⁷⁾

Magister Administrasi Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

g100250047@student.ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan dana, serta peran para pemangku kepentingan dalam keberlangsungan operasional SD Muhammadiyah Tunas Surya Kabupaten Klaten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan kepala sekolah, guru, bendahara, PCM, BPH, dan pelaku usaha, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sementara keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan SD Muhammadiyah Tunas Surya bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), serta dukungan swadaya dari Badan Pengurus Harian (BPH) dan pelaku usaha sekitar. BPH menjadi penopang utama dalam mencukupi kekurangan anggaran, termasuk pembangunan sarana prasarana dan operasional rutin, karena kontribusi PCM masih terbatas. Sekolah telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam penyusunan RAPBS dan pengelolaan anggaran, sehingga meskipun keterbatasan dana, proses pembelajaran tetap berjalan efektif, efisien, dan transparan untuk keberlangsungan lembaga pada masa awal pertumbuhan.

Abstract

This study aims to describe the sources of funding, fund management mechanisms, and the roles of stakeholders in the operational sustainability of SD Muhammadiyah Tunas Surya in Klaten Regency. The study uses a descriptive qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through observation, interviews with the principal, teachers, treasurer, PCM, BPH, and business actors, as well as documentation studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through triangulation of sources, techniques, and time. The results of the study show that the financing of SD Muhammadiyah Tunas Surya comes from the Education Unit Operational Assistance (BOSP) fund, Education Development Contributions (SPP), and self-help support from the Daily Management Board (BPH) and local business actors. The BPH is the main pillar in covering budget shortfalls, including the construction of infrastructure and routine operations, because PCM contributions are still limited. The school has implemented School-Based Management (MBS) in the preparation of the RAPBS and budget management, so that despite limited funds, the learning process remains effective, efficient, and transparent of the institution in its early stages of growth.

Sejarah Artikel

Diterima: 12-05-2025
Direview: 28-06-2025
Disetujui: 31-07-2025

Kata Kunci

Strategi, Financial, Kepala Sekolah, Sekolah Dasar.

Article History

Received: 12-05-2025
Reviewed: 28-06-2025
Published: 31-07-2025

Key Words

Strategy, Financial, Leadership, Elementary School

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia karena diberikan pada masa *golden age*, yaitu periode paling menentukan dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak (Setiawan, 2019). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa PAUD diberikan sejak anak lahir hingga usia enam tahun sebagai bentuk stimulasi perkembangan untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya (RI, 2003). Pada tahap ini, kualitas layanan pendidikan sangat menentukan kesiapan anak dalam menghadapi pendidikan dasar (Marinda, 2020).

UNESCO menggolongkan usia 0–8 tahun sebagai rentang usia anak usia dini, dengan usia 6–8 tahun sebagai masa transisi menuju kemandirian (UNESCO, 2010). Perbedaan pengategorian ini menunjukkan bahwa fase SD, khususnya kelas awal, masih termasuk usia kritis yang membutuhkan dukungan pendidikan dasar yang kuat, terencana, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (Sabri, 2024). Indonesia merupakan negara dengan angka kelahiran yang tinggi, dengan 4,8 juta kelahiran setiap tahun sehingga menempati posisi keempat sebagai negara dengan pertumbuhan populasi terbesar di dunia (BPS, 2022). Kondisi ini menuntut tersedianya layanan pendidikan dasar yang memadai dan merata. Di Jawa Tengah, jumlah peserta didik SD pada Tahun Pelajaran 2024/2025 mencapai 2.578.683 siswa, tersebar pada sekolah negeri maupun swasta (Kemendikbud, 2024). Data ini menunjukkan tingginya kebutuhan akses pendidikan dasar dan kapasitas pembiayaan yang besar pada setiap satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) di bawah Muhammadiyah, yang berperan penting dalam membuka akses pendidikan hingga tingkat desa/kelurahan (Syaadah et al., 2022). Keberadaan lembaga pendidikan berbasis masyarakat ini memperluas kesempatan anak memperoleh layanan pendidikan, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau fasilitas pemerintah (Lukman, 2021). Pemerintah telah menetapkan target mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perluasan akses pendidikan dasar, yang diukur melalui parameter Angka Partisipasi Kasar (APK). Tinggi rendahnya APK mencerminkan kemampuan sekolah-sekolah di suatu wilayah dalam menjangkau anak usia sekolah. Di tingkat cabang Muhammadiyah (PCM), sekolah-sekolah memiliki jangkauan sosial yang dekat dengan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan APK melalui layanan pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses.

SD Muhammadiyah Tunas Surya di PCM Kalikotes, Klaten, merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan dasar berbasis masyarakat. Lokasi sekolah yang dekat dengan pemukiman warga, integrasinya dengan

Kelompok Bermain (KB), serta orientasi sosialnya menjadikan sekolah ini memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan dasar. Kendala transportasi dan keterbatasan pemantauan anak menjadi alasan bagi banyak orang tua memilih lembaga pendidikan yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Penelitian mengenai pembiayaan pendidikan pada sekolah swasta telah banyak dilakukan Mawati et al., (2023) menemukan bahwa pembiayaan sekolah swasta sangat bergantung pada kombinasi sumber dana internal (orang tua dan yayasan) serta eksternal (pemerintah). Perdana, (2019) menunjukkan bahwa transparansi pembiayaan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi orang tua. Penelitian Minsih et al., (2019) menegaskan bahwa dana BOS berpengaruh signifikan dalam mendukung operasional dasar sekolah swasta. Penelitian Suaidi et al., (2021) menemukan bahwa sekolah berbasis masyarakat lebih adaptif dalam mengelola pendanaan karena memiliki struktur organisasi yang fleksibel. Penelitian (Putri et al., 2021) menyimpulkan bahwa sekolah kecil di tingkat desa memerlukan strategi pembiayaan khusus agar keberlanjutannya terjaga.

Penelitian terdahulu telah membahas pembiayaan sekolah swasta, tetapi belum banyak kajian yang secara khusus menelaah kontribusi pendanaan pada sekolah dasar yang berada di bawah PCM Muhammadiyah, terutama yang memiliki integrasi layanan dengan KB dan beroperasi di wilayah semi-perdesaan seperti SD Muhammadiyah Tunas Surya. Hal ini menjadi celah penelitian yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pembiayaan pendidikan pada lembaga swasta diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, PP, dan Permendikbud yang mengatur standar pembiayaan. Negara bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar, termasuk bagi siswa di sekolah swasta. Namun, sekolah swasta juga diperbolehkan melakukan pungutan dengan persetujuan Komite Sekolah, sepanjang tidak membebani orang tua dan tetap responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (Putusan MK No. 013/PUU-VI/2008).

Salah satu sumber pembiayaan utama sekolah swasta adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Dana ini berfungsi mendukung seluruh kebutuhan operasional sekolah dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Besaran alokasi dana BOSP untuk SD ditetapkan sebesar Rp900.000 per siswa per tahun (Kemendikbud, 2025), sehingga sekolah dengan jumlah siswa terbatas harus mengelola dana secara kreatif agar layanan pendidikan tetap optimal. Untuk dapat menerima dana BOSP, sekolah harus memenuhi syarat administratif tertentu, termasuk kepemilikan NPSN, pemutakhiran data Dapodik secara berkala, memiliki jumlah minimal sembilan peserta didik, serta bukan lembaga kerja sama internasional. Syarat-syarat ini memberi konsekuensi bahwa sekolah swasta kecil harus berupaya menjaga keberlanjutan penerimaan siswa dan integritas datanya agar tidak kehilangan akses pembiayaan pemerintah.

Dalam konteks SD Muhammadiyah Tunas Surya, pembiayaan operasional berasal dari beragam sumber, yaitu BOSP, dukungan PCM, kontribusi orang tua, dan dukungan

masyarakat sekitar. Namun, belum ada penelitian yang mengidentifikasi proporsi kontribusi setiap sumber, bagaimana pemanfaatannya, serta sejauh mana pendanaan tersebut mempengaruhi keberlanjutan dan mutu layanan pendidikan. Adanya tantangan dalam pengelolaan pendanaan sekolah kecil berbasis masyarakat, seperti besarnya ketergantungan pada jumlah siswa, keterbatasan dana dari pemerintah, serta kebutuhan untuk menyediakan fasilitas yang memadai sesuai standar nasional pendidikan. Tanpa manajemen pendanaan yang baik, sekolah berisiko mengalami keterbatasan layanan atau bahkan penurunan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini memiliki keunikan dengan fokus pada model pembiayaan di SD Muhammadiyah Tunas Surya, yang terintegrasi dengan layanan PAUD dan beroperasi di wilayah semi-perdesaan, sebuah konteks yang jarang dijadikan objek kajian dalam literatur terkait pembiayaan pendidikan. Berbeda dengan banyak penelitian yang menyoroti sekolah swasta besar atau di kawasan perkotaan, penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana sekolah kecil berbasis masyarakat dapat mengelola pendanaan secara kreatif dan adaptif, memanfaatkan sumber dana dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dukungan dari PCM, kontribusi orang tua, serta partisipasi masyarakat sekitar. Dengan pemahaman ini, penelitian ini mengisi celah literatur tentang keberlanjutan sekolah berbasis masyarakat dan memberikan wawasan praktis untuk kebijakan pendanaan yang lebih efektif di tingkat desa, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di daerah tersebut.

Penelitian ini terletak pada pentingnya memahami secara komprehensif bagaimana model pembiayaan pada SD Muhammadiyah Tunas Surya bekerja, mengingat sekolah kecil berbasis PCM berperan sebagai ujung tombak percepatan APK di tingkat desa. Informasi tentang sumber pendanaan, pola pemanfaatan, dan kontribusi dana bagi operasional sekolah dapat menjadi dasar bagi PCM, pemerintah daerah, maupun Kemendikbudristek dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang lebih adaptif untuk sekolah berbasis masyarakat. Penelitian ini terletak pada fokusnya pada analisis kontribusi pendanaan pada sekolah dasar kecil di bawah PCM Muhammadiyah yang terintegrasi dengan layanan PAUD. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti sekolah swasta besar atau sekolah di wilayah perkotaan. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur terkait manajemen pembiayaan sekolah berbasis masyarakat di tingkat akar rumput dan memberikan gambaran nyata model pendanaan yang dapat meningkatkan keberlanjutan sekolah kecil di wilayah semi-perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus untuk memperoleh gambaran utuh, sistematis, dan mendalam tentang pembiayaan di SD Muhammadiyah Tunas Surya Kabupaten Klaten (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan

melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui sistem pendanaan sekolah, seperti kepala sekolah, bendahara, pengurus PCM, guru, serta perwakilan orang tua. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang relevan, dengan melibatkan informan kunci seperti kepala sekolah, bendahara, pengurus PCM, serta perwakilan orang tua. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data yang berkaitan dengan pembiayaan dan keberlanjutan operasional sekolah. Sumber data terdiri atas data primer (hasil wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumen keuangan, laporan administrasi, kebijakan BOSP, dan arsip lembaga). Pendekatan induktif digunakan agar temuan penelitian benar-benar berangkat dari realitas empiris yang ditemukan di lapangan.

Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkesinambungan (Hasibuan et al., 2022). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Melalui desain penelitian ini, peneliti diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai sumber pendanaan, pemanfaatan dana, serta kontribusinya terhadap keberlangsungan layanan pendidikan di SD Muhammadiyah Tunas Surya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Muhammadiyah Tunas Surya, yang baru memasuki tahun kedua operasional, menghadapi kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, baik untuk infrastruktur, kegiatan pembelajaran, maupun operasional harian. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru, dan pengurus PCM, sumber pendanaan sekolah berasal dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), serta dukungan swadaya dari pendiri dan inisiator, yaitu Prof. dr. Suntoro Wongso Atmojo, M.Si dan H. Ponidi selaku muwakif. Selama dua tahun terakhir, PCM Kalikotes belum dapat memberikan dukungan signifikan dalam pembiayaan karena kondisi keuangan AUM di wilayah tersebut belum stabil. Dijelaskan oleh Kepala Sekolah yakni :

“Sejak sekolah ini berdiri dua tahun lalu, kebutuhan pembiayaan kami memang cukup besar, terutama untuk sarana prasarana dan operasional harian. Dana BOSP membantu, tetapi belum bisa menutup semua kebutuhan, sehingga kami masih bergantung pada swadaya dari BPH dan para pendiri.”

Hal lain diperkuat oleh BPH SD Muhammadiyah Tunas Surya yakni:

“Kami dari BPH berusaha menutupi kekurangan pembiayaan agar sekolah tetap berjalan. Mulai dari pembangunan ruang kelas, pembayaran listrik-air, hingga tambahan honor guru, sebagian besar masih kami tanggung karena kami ingin sekolah ini kuat lebih dulu.”

Selain itu dipertegas oleh Pelaku Usaha menyatakan bahwa :

“Kami ikut membantu sebisa mungkin. Misalnya, menyediakan meja kursi, ruang belajar di tempat usaha kami, atau membayar beberapa kebutuhan seperti air dan listrik. Tidak selalu berupa uang, tapi kami ingin mendukung perkembangan sekolah ini,”

Badan Pengurus Harian (BPH) memiliki peran sangat besar dalam menopang keberlangsungan sekolah. BPH tidak hanya menyediakan sarana prasarana secara swadaya, tetapi juga menanggung kekurangan pembiayaan operasional yang tidak tercukupi oleh BOSP dan SPP. Sumber pembiayaan tidak mengikat lainnya berasal dari pelaku usaha sekitar yang memberikan bantuan berupa sarana belajar, fasilitas pembelajaran, serta pembayaran tagihan operasional seperti air dan listrik. Sementara itu, dana SPP yang rutin dibayarkan peserta didik berkisar antara Rp50.000–Rp100.000 per bulan, namun belum sepenuhnya mampu menutup pembiayaan kebutuhan pembelajaran dan tambahan honorarium guru. Hal ini diperkuat oleh Bendahara Sekolah yakni :

“SPP siswa yang masuk belum mencukupi kebutuhan operasional. Rata-rata hanya Rp50.000 sampai Rp100.000 per bulan, itu pun tidak semua orang tua membayar tepat waktu. Kekurangan biaya setiap bulan hampir selalu ditutup oleh BPH”.

Sejalan dengan itu dipertegas oleh PCM Kalikotes, menyatakan bahwa:

“Kami mengakui bahwa dalam dua tahun ini BPH menjadi pihak yang paling besar kontribusinya. Secara kelembagaan PCM belum bisa maksimal membantu pendanaan karena kondisi AUM masih belum stabil. Untuk pembiayaan inti, BPH-lah yang selama ini memegang peran sentral”.

SD Muhammadiyah Tunas Surya sudah memiliki legalitas operasional dari Dinas Pendidikan serta menjalankan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam penyusunan anggaran. Penggunaan dana BOSP telah mengikuti petunjuk teknis terbaru dan dialokasikan untuk kebutuhan pembelajaran, pemeliharaan, dan operasional dasar. Kebutuhan yang tidak dapat dibiayai oleh BOSP atau SPP kemudian dipetakan dan diajukan kepada BPH melalui mekanisme revisi RAPBS. Kerja sama sinergis antara sekolah, BPH, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor utama keberlangsungan sekolah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun.

Pembahasan

Teori pembiayaan pendidikan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa struktur pembiayaan SD Muhammadiyah Tunas Surya sesuai dengan konsep pembiayaan pendidikan

menurut Hidayah & Nurfuadi, (2023) yang menyatakan bahwa sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, dan pihak donor. Dominasi peran BPH dalam menopang operasional sejalan dengan temuan penelitian Syafi'i et al., (2025) yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan baru cenderung bergantung pada dukungan swadaya hingga stabil secara kelembagaan. Minimnya kontribusi PCM Kalikotes menguatkan pendapat bahwa organisasi penyelenggara sering mengalami keterbatasan finansial pada fase awal berdirinya sekolah.

Manajemen berbasis sekolah (MBS), penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam pengelolaan BOSP dan penyusunan anggaran juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Hartati & Ma'ruf, (2022) bahwa sekolah diberikan kekuasaan otonom untuk mengelola sumber daya agar efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan. Praktik transparansi dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan BPH menunjukkan bahwa SD Muhammadiyah Tunas Surya telah menerapkan prinsip akuntabilitas MBS. Penelitian oleh Idharudin et al., (2025) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan komite sekolah merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi MBS di sekolah perintis.

Penelitian Marlina, (2022) oleh menegaskan bahwa keberlanjutan sekolah di tingkat dasar sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan sektor swasta. Dalam konteks SD Muhammadiyah Tunas Surya, partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pelaku usaha lokal terbukti efektif dalam menutupi kekurangan dana yang tidak dapat dipenuhi oleh SPP atau BOSP. Kontribusi swadaya masyarakat ini sejalan dengan konsep pembiayaan berbasis komunitas yang dikembangkan oleh Benedetta et al., (2024), yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dan kemitraan dengan pihak lokal memperkuat daya tahan finansial sekolah, terutama di daerah semi-perdesaan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Castanho et al., (2021) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kecil yang terletak di daerah dengan infrastruktur terbatas harus menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel untuk memastikan keberlanjutan operasional. Penemuan ini sejalan dengan temuan penelitian ini, yang menggambarkan bagaimana SD Muhammadiyah Tunas Surya memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah dan SPP. Praktik ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas dan kreatifitas dalam manajemen keuangan pendidikan pada sekolah dengan sumber daya terbatas, yang dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah serupa di wilayah terpencil.

Dukungan swadaya dari pelaku usaha lokal dan masyarakat sekitar mencerminkan konsep *community-based support* seperti yang dijelaskan dalam penelitian Supriatna, (2023), bahwa keberlanjutan sekolah baru sangat dipengaruhi oleh partisipasi sosial dan hubungan kemitraan dengan masyarakat. Kenaikan jumlah peserta didik setiap tahun juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik, selaras dengan teori eksistensi lembaga pendidikan dari Mudatsir et al., (2021) bahwa legitimasi sosial muncul ketika sekolah mampu menunjukkan

pelayanan bermutu meski dengan sumber daya terbatas. Dengan demikian, pembiayaan yang bersifat kolaboratif menjadi kekuatan utama yang memastikan SD Muhammadiyah Tunas Surya tetap berjalan secara konsisten meskipun berada pada masa perintisan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan SD Muhammadiyah Tunas Surya pada masa perintisan sangat bergantung pada kolaborasi sekolah, BPH, orang tua, dan masyarakat. BOSP dan SPP belum mampu mencukupi kebutuhan infrastruktur, pembelajaran, dan operasional, sehingga BPH menjadi penopang utama melalui penyediaan sarana prasarana dan penutupan kekurangan biaya, termasuk honorarium guru. Dukungan pelaku usaha sekitar berupa fasilitas belajar dan bantuan operasional memperlihatkan kuatnya modal sosial yang terbentuk. Minimnya dukungan finansial PCM menunjukkan bahwa kondisi keuangan lembaga induk sangat memengaruhi daya dukung mereka terhadap sekolah baru. Penerapan manajemen berbasis sekolah memungkinkan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan adaptif sehingga kebutuhan prioritas dapat terpenuhi. Secara keseluruhan, kolaborasi pendanaan berbasis komunitas menjadi strategi kunci yang memungkinkan sekolah bertahan, berkembang, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Saran

Hasil penelitian ini, disarankan agar SD Muhammadiyah Tunas Surya memperluas sumber pendanaan melalui kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan pada BPH.

1. **Evaluasi Penggunaan BOSP dan SPP secara Berkala:** Disarankan agar pihak sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana BOSP dan besaran SPP untuk memastikan alokasi dana yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta pembelajaran yang ada. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
2. **Penguatan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS):** Untuk meningkatkan keberlanjutan operasional sekolah, disarankan agar penerapan MBS diperkuat dengan lebih menekankan pada transparansi anggaran dan pelibatan orang tua dalam perencanaan keuangan sekolah. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan memberikan rasa tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana.
3. **Penataan Administrasi Keuangan yang Lebih Tertib:** Agar hambatan seperti keterlambatan pembayaran SPP dan ketergantungan pada dana swadaya dapat diatasi, disarankan untuk melakukan penataan administrasi keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini termasuk pemantauan pembayaran SPP yang lebih baik dan

pengelolaan keuangan yang efisien guna mengurangi ketergantungan pada dana eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Benedetta, G., Palmieri, E., Miani, S., & Stefanelli, V. (2024). Research in International Business and Finance The impact of FinTech innovation on digital financial literacy in Europe: Insights from the banking industry. *Research in International Business and Finance*, 69, 102218. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102218>
- Castanho, R. A., Gómez, J. M. N., Vulevic, A., Behradfar, A., & Couto, G. (2021). Assessing transportation patterns in the azores archipelago. *Infrastructures*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/infrastructures6010010>
- Febiani, R. R. M., & Krisnani, H. (2020). PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI SEORANG ANAK DARI USIA DINI. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 40–47.
- Hartati, S., & Ma`ruf, C. (2022). Systematisasi Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Journal of Islamic Education and Learning*, 2(1), 37–48. <http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JIEL/article/view/50%0Ahttp://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JIEL/article/download/50/45>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hidayah, N., & Nurfuadi. (2023). PENGALIAN SUMBER DANA PENDIDIKAN. *EduCurio Journal*, 1(2), 660 – 665. <https://qjurnal.my.id/index.php/educurio>
- Idharudin, A. J., Abdurrahman, Nurwahida, & Samsuddin. (2025). Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Indonesia Emas. *As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)*, 01(03), 575–591.
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal. *DIKLUS : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 180–190.
- Marinda, L. (2020). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 13(1), 116–152. <https://doi.org/10.35719/annisa.v13i1.26>
- Marlina, T. (2022). URGENSI DAN IMPLIKASI PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 67–72.
- Mawati, A. T., Hanafiah, & Arifudin, O. (2023). Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Primary Edu (JPE)*, 1(1), 69–82.
- Minsih, Rusnilawati, & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 6(1), 29–40. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.8467>
- Mudatsir, Munandar, A., & Ansar. (2021). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Educational Journal of Islamic Management (EJIM)*, 1(2), 55–65.

- Perdana, F. J. (2019). Pentingnya Kepercayaan Diri dan Motivasi Sosial Dalam Keaktifan Mengikuti Proses Kegiatan Belajar. *Jurnal Edueksos*, VIII(2), 70–87.
- Putri, S. Y., Yanti, M. Y., & Martha, A. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Iklim Sekolah Dan Komitmen Profesional Guru. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(4), 492–500. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i4.1772>
- Sabri, M. (2024). Exclusive Learning Program Sebagai Inovasi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kemampuan Abad 21 (Kreatif, Kritis, Komunikatif dan Kolaboratif). *Jurnal Manajemen Dan Budaya*, 4(1), 70–79. <https://doi.org/10.51700/manajemen.v4i1.558>
- Setiawan, R. (2019). Peran Pendidik Dalam Mengatasi Permasalahan Pertumbuhan Dan Perkembangan Peserta Didik. *El-Tarbawi*, 12(1), 23–36. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol12.iss1.art2>
- Suaidi, Ngulwiyah, I., & Jakaria. (2021). Membangun Karakter Anak Didik Melalui Keteladanan Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1), 111–124. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11612>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Supriatna, E. (2023). INISIATIF PARTISIPASI SOSIAL DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH: STUDI KASUS PADA JARINGAN KERJA DAN KOLABORASI ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH, LSM, DAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 273–289.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Syafi'i, M., Samsudin, M., & Samiyah. (2025). TEROBOSAN STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH SISWA DI LEMBAGA PENDIDIKAN. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan (JAMED)*, 1(3), 137–147.